

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk melihat kesejahteraan masyarakat serta mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi akan menjadi faktor peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional (Farraas, 2024). Perencaranaan pembangunan ekonomi di Indonesia menghadapi kendala yang berkaitan dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya secara langsung akan mempengaruhi perkembangan angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja (Adinda, 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebanyak 281,60 juta jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 26,02 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 255,59 juta jiwa. Selama Periode 2015 hingga 2024, laju pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata per tahun tercatat sekitar 1,80 persen (Bps, 2025). Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, peningkatan jumlah angkatan kerja pun tidak dapat dihindari. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 mencapai 154,00 juta jiwa, meningkat 1,89 juta jiwa dibandingkan dengan Agustus 2024. Dari jumlah tersebut, penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 146,54 juta jiwa, meningkat 1,90 juta jiwa dari tahun sebelumnya (Bps, 2025). Meskipun jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, permasalahan pengangguran tetap menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan, yaitu kelahiran (Fertilitas), kematian (Mortalitas), dan migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk, baik secara individu maupun kelompok dari satu daerah ke daerah lainnya (Fivien et al., 2020). Migrasi nasional merupakan perpindahan

penduduk baik secara individu maupun berkelompok, yang terjadi antarwilayah dalam satu negara. Sedangkan, migrasi internasional adalah perpindahan penduduk baik individu maupun berkelompok, dari satu negara ke negara lain (Achsin, 2021 dalam Adinda Thalia Salsabilla, 2024). Migrasi tenaga kerja internasional atau dikenal sebagai pekerja migran Indonesia, merupakan perpindahan pekerja dari negara asal menuju negara tujuan dengan melintasi batas negara untuk tujuan bekerja. Aktivitas ini umumnya memberikan berbagai keuntungan, terutama peningkatan kondisi ekonomi bagi pekerja dan keluarganya. Fenomena tersebut dipicu oleh sejumlah alasan, khususnya faktor ekonomi dan sosial di dalam negeri (Noveria, 2017 dalam Santoso et al., 2024).

Menurut Everett S Lee, langkah seseorang untuk bermigrasi tidak lepas dari dua faktor, yakni faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*), faktor pendorong umumnya muncul akibat ketimpangan ekonomi dan ketidakseimbangannya pembangunan antarwilayah atau antarnegara. Kondisi ini dapat berupa banyaknya tenaga kerja di daerah asal, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya angka pengangguran. Perbedaan tingkat pendapatan antarnegara dan rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab seseorang memilih meninggalkan daerah asalnya. Adapun faktor penarik berkaitan dengan daya tarik negara tujuan yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih pesat. Negara yang menyediakan kesempatan kerja lebih banyak, menawarkan upa yang lebih tinggi, serta lingkungan sosial dan fasilitas publik yang lebih baik menjadi penarik bagi tenaga kerja dari negara lain. Keputusan individu untuk bermigrasi tidak hanya dipicu oleh kondisi yang kurang menguntungkan di daerah asal, tetapi juga harapan akan kehidupan dan kesempatan kerja yang lebih baik di daerah tujuan (Everett S. Lee, 1966 dalam Adinda, 2021).

Berdasarkan data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, (2025), jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tingkat nasional selama periode 2017–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah PMI tercatat sebanyak 263.493 orang, kemudian meningkat menjadi 283.910 orang pada tahun 2018. Selanjutnya, jumlah PMI sedikit menurun menjadi 277.493 orang pada tahun 2019. Penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai 112.928 orang dan kembali menurun menjadi 72.394 orang pada tahun 2021 akibat

pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas tenaga kerja internasional. Seiring dengan mulai pulihnya kondisi ekonomi dan dibukanya kembali akses penempatan tenaga kerja ke luar negeri, jumlah PMI kembali meningkat menjadi 200.718 orang pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 297.109 orang pada tahun 2023, dan mencapai 297.433 orang pada tahun 2024. Selain itu, berdasarkan daerah asalnya, Provinsi Jawa Timur secara konsisten menjadi provinsi dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia tertinggi di tingkat nasional selama periode tersebut. Berikut disajikan data jumlah Pekerja Migran Indonesia menurut provinsi selama periode 2017–2024:

Tabel 1 Total Jumlah Pekerja Migran di Indonesia tahun 2017-2024

No	Provinsi	Jumlah PMI	No	Provinsi	Jumlah PMI
1.	Jawa Timur	482.565	20.	Sulawesi Utara	3.954
2.	Jawa Tengah	399.724	21.	Sulawesi Tengah	2.908
3.	Jawa Barat	352.796	22.	Kalimantan Utara	2.640
4.	Nusa Tenggara Barat	196.990	23.	Bengkulu	2.545
5.	Lampung	130.618	24.	Jambi	1.837
6.	Sumatera Utara	84.100	25.	Sulawesi Tenggara	1.740
7.	Bali	45.290	26.	Sulawesi Barat	1.304
8.	Banten	16.731	27.	Kalimantan Selatan	995
9.	Sumatera Selatan	11.130	28.	Maluku	374
10.	Nusa Tenggara Timur	10.056	29.	Kalimantan Tengah	315
11.	Di Yogyakarta	8.539	30.	Papua	189
12.	Sulawesi Selatan	7.918	31.	Bangka Belitung	167
13.	Kalimantan Barat	7.496	32.	Gorontalo	90
14.	Dki Jakarta	7.127	33.	Maluku Utara	78
15.	Kepulauan Riau	6.018	34.	Papua Barat	48
16.	Sumatera Barat	5.752	35.	Papua Tengah	1
17.	Kalimantan Timur	5.071	36.	Papua Selatan	1
18.	Aceh	4.216	37.	Papua Barat Daya	1
19.	Riau	4.154			

Sumber: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (diolah), 2025

Berdasarkan Tabel 1, terlihat provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertinggi di Indonesia selama periode 2017–2024 dengan total 482.565 orang, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sebanyak 399.724 orang dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 352.796 orang. Tingginya jumlah PMI dari Jawa Timur menunjukkan bahwa provinsi ini menjadi salah satu daerah penyumbang utama tenaga kerja migran Indonesia. Kondisi

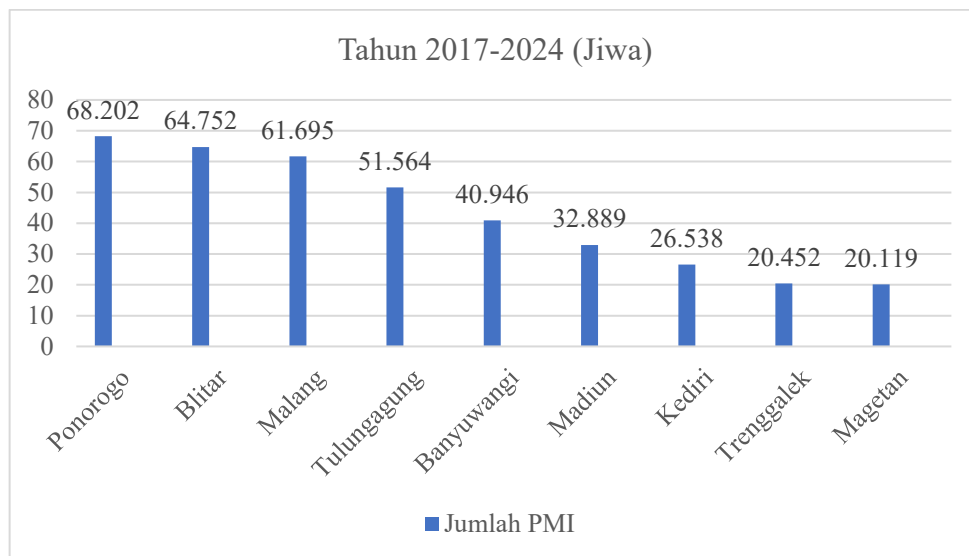
tersebut mengindikasikan bahwa keputusan masyarakat untuk bekerja di luar negeri masih menjadi alternatif dalam memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik (Adinda Thalia Salsabilla, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Provinsi Jawa Timur dengan memilih lima kabupaten yang memiliki jumlah PMI tertinggi, yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah data banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2017 hingga 2024:

Tabel 2 Jumlah PMI di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2024

NO	Kab/Kota	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ponorogo	9.185	10.048	9.700	5.370	4.123	7.568	10.879	11.329
2.	Malang	8.294	8.836	7.953	5.578	4.824	6.589	9.332	10.289
3.	Blitar	8.472	9.193	9.176	5.442	4.614	6.961	10.242	10.652
4.	Tulungagung	7.183	8.198	8.636	4.010	2.362	5.200	7.946	8.029
5.	Banyuwangi	5.175	6.128	6.352	3.335	2.432	4.334	6.432	6.758
6.	Madiun	4.659	4.877	4.919	2.664	2.078	3.531	4.908	5.253
7.	Kediri	3.611	4.080	3.970	2.106	1.683	2.574	4.198	4.316
8.	Magetan	2.792	2.996	2.988	1.506	1.157	2.250	3.219	3.211

Sumber: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (diolah), 2025

Pada tabel 2 diketahui bahwa jumlah PMI di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 hingga 2024 mengalami fluktuasi di hampir semua kabupaten. Secara umum, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dan 2021, yang dipengaruhi oleh pandemi covid-19 menyebabkan pembatasan mobilitas tenaga kerja ke luar negeri. Namun, setelah tahun 2022 jumlah PMI kembali meningkat di sebagian besar daerah, hal ini menandakan adanya pemulihan aktivitas migrasi tenaga kerja internasional.



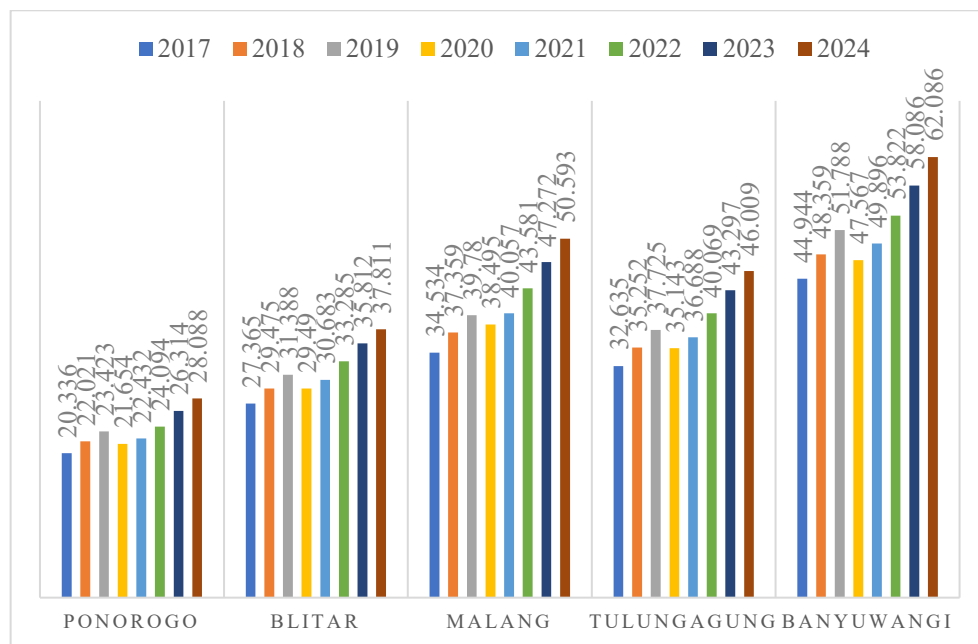
Sumber: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (diolah), 2025
Gambar 1 Total Jumlah PMI Per-Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2024

Berdasarkan daerah asalnya, selama tahun 2017 hingga 2024 terdapat lima kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Ponorogo, Blitar, Malang, Tulungagung, dan Banyuwangi. Kelima kabupaten tersebut secara konsisten menempati posisi teratas dalam pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Kabupaten Ponorogo menjadi daerah dengan Jumlah PMI tertinggi setiap tahunnya, diikuti oleh Kabupaten Blitar, Malang, Tulungagung dan Banyuwangi. Kondisi ini mencerminkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki kultur migrasi yang kuat serta tingkat kesiapan masyarakat yang relatif tinggi untuk bekerja di luar negeri.

Menurut teori yang dikemukakan Everett S Lee, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bermigrasi meliputi faktor pendorong dan faktor penarik, dalam konteks migrasi tenaga kerja Indonesia variabel seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpotensi menjadi faktor pendorong utama pekerja migran asal Jawa Timur.

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia Meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah pemulihan yang positif, perbedaan kesejahteraan antarwilayah masih terlihat nyata. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik (Bps, 2025), PDB per kapita nasional mencapai Rp. 78,6 juta atau setara dengan USD 4.960,3. Namun, sebagian besar wilayah khususnya daerah nonmetropolitan dan pedesaan masih mencatat nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional tersebut. Kondisi serupa juga tampak di Provinsi Jawa Timur, dimana perbedaan antar kabupaten sangat mencolok. Berikut data PDRB per kapita Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) pada 5 Kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Jawa Timur:



Sumber: Badan Pusat Statistik, (diolah), 2025

Gambar 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ADHB

Jika ditinjau berdasarkan wilayah, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan harga berlaku pada tahun 2024 tercatat sebesar 108,92 triliun rupiah. Jika dilihat secara nominal, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,62 triliun rupiah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 101,30 triliun rupiah. Kenaikan PDRB ini terjadi karena adanya peningkatan output pada sebagian besar sektor usaha, serta dipengaruhi oleh kondisi inflasi yang terjadi. Apabila dilihat dari sisi harga konstan tahun 2010, nilai PDRB juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari 60,85 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 63,69 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Banyuwangi mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68 persen, yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi

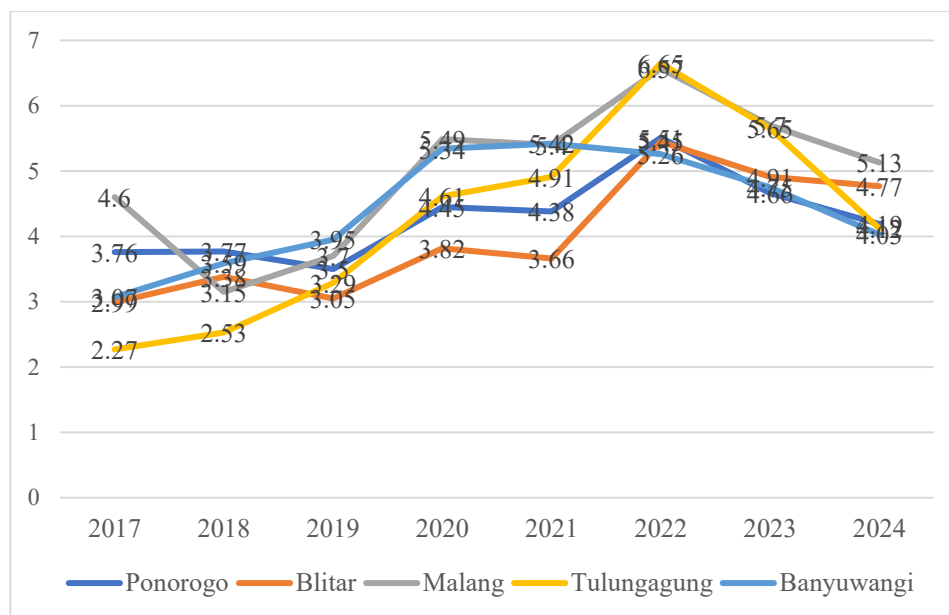
riil karena didukung oleh peningkatan output pada berbagai sektor usaha tanpa dipengaruhi oleh faktor inflasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki struktur ekonomi yang kuat, beragam, dan mampu menopang aktivitas perekonomian daerah.

Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada tingginya PDRB per kapita yang mencapai Rp. 62.086 ribu atau sekitar Rp. 62,1 juta per penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa besarnya total PDRB daerah tersebut terbagi pada jumlah penduduk yang menghasilkan rata-rata pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Malang sebesar Rp. 50.593 ribu, Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 46.009 ribu, Kabupaten Blitar Rp. 37.811 ribu, dan Kabupaten Ponorogo Rp. 28.088 ribu.

Sebagai perbandingan, Kota Kediri menempati posisi tertinggi dengan jumlah PDRB per kapita sebesar Rp. 565.841 ribu, jauh diatas kabupaten Ponorogo, Blitar, Malang, dan Tulungagung. Tingginya nilai tersebut didorong oleh keberadaan PT Gudang Garam, Tbk, perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang menyumbang sekitar 70 persen dari total PDRB kota Kediri. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016 dalam penelitian (Fatmawatie, 2019), nilai PDRB kota Kediri tanpa aktivitas PT Gudang Garam hanya sekitar Rp. 8-9 triliun, sedangkan dengan kontribusinya meningkat signifikan menjadi sekitar Rp. 31-33 triliun. Mayoritas penduduk Kediri bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat relatif lebih tinggi. Kondisi ekonomi yang kuat ini berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri, tercermin dari jumlah PMI asal Kota Kediri tahun 2024 yang hanya berjumlah 187 jiwa, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Ponorogo sebagai daerah dengan jumlah PMI tertinggi di Jawa Timur. Perbandingan ini memperjelas bahwa kondisi ekonomi daerah memiliki hubungan erat dengan kecenderungan migrasi penduduk, sekaligus memperkuat alasan pemilihan lima kabupaten dalam penelitian karena menunjukkan variasi nyata antara kemampuan ekonomi daerah dan jumlah PMI yang dikirim.

Faktor lain yang juga berperan penting dalam mendorong migrasi tenaga kerja adalah tingkat pengangguran. Menurut Badan Pusat statistik (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2023) Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)

mencangkup individu yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang berupaya mencari lowongan kerja, mereka yang tengah menyiapkan usaha, orang yang telah diterima bekerja tetapi belum mulai menjalankan tugasnya, serta penduduk yang berhenti mencari pekerjaan karena merasa gagal setelah berkali-kali mencoba. Berikut adalah data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada lima Kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Jawa Timur:



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2023

Gambar 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur

Berdasarkan gambar 3 diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di lima kabupaten Jawa Timur mengalami fluktuasi yang cukup mencolok dari tahun ke tahun. Pada masa sebelum pandemi, tepatnya 2017 hingga 2019 angka pengangguran masih relatif rendah antara 2,27 hingga 4,60 persen. Situasi tersebut berubah secara signifikan setelah masuknya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, dimana Tingkat Pengangguran meningkat menjadi 4,45 persen di Kabupaten Ponorogo, 5,49 persen di Kabupaten Malang, 3,82 persen di Kabupaten Blitar, 4,61 persen di Kabupaten Tulungagung, serta 5,34 di Kabupaten Banyuwangi. Tekanan ekonomi yang terus berlangsung kembali memicu lonjakan pada tahun 2022 dengan Kabupaten Tulungagung mencatat nilai tertinggi sebesar 6,65 persen.

Peningkatan pengangguran sangat mungkin dipicu oleh melemahnya sektor-sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, dan pariwisata akibat pukulan

pandemi. Bertambahnya jumlah pengangguran tersebut membuat persaingan tenaga kerja di pasar domestik semakin ketat, sementara kesempatan kerja yang tersedia tidak berkembang secepat pertumbuhan angkatan kerja. Kondisi inilah yang menjadikan migrasi internasional sebagai salah satu strategi yang dianggap mampu memberikan peluang baru, dimana keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diyakini dapat menjadi sarana untuk menekan angka pengangguran dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, sekaligus membantu pemerintah dalam menekan persoalan ekonomi yang muncul akibat tingginya pengangguran di dalam negeri (Adinda Thalia Salsabilla, 2024).

Faktor utama yang mendorong terjadinya migrasi internasional adalah adanya kesenjangan pendapatan antara negara asal dengan negara tujuan. Akibatnya, arus tenaga kerja migran biasanya mengalir dari negara dengan tingkat pembangunan ekonomi rendah dan upah yang relatif kecil menuju negara dengan ekonomi lebih maju dan menawarkan upah lebih tinggi. Para pekerja memperoleh penghasilan lebih besar di luar negeri dibandingkan dengan pekerjaan sejenis di dalam negeri, kemudian sebagian penghasilannya dikirim kembali ke negara asal (remitan) untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fenomena ini terjadi secara wajar sebagai tuntutan terhadap kebutuhan hidup (Adinda Thalia Salsabilla, 2024). Berikut besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada lima Kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Jawa Timur selama periode 2017-2024:

Tabel 3 Upah Minimum Kabupaten pada 5 Kabupaten Jawa Timur

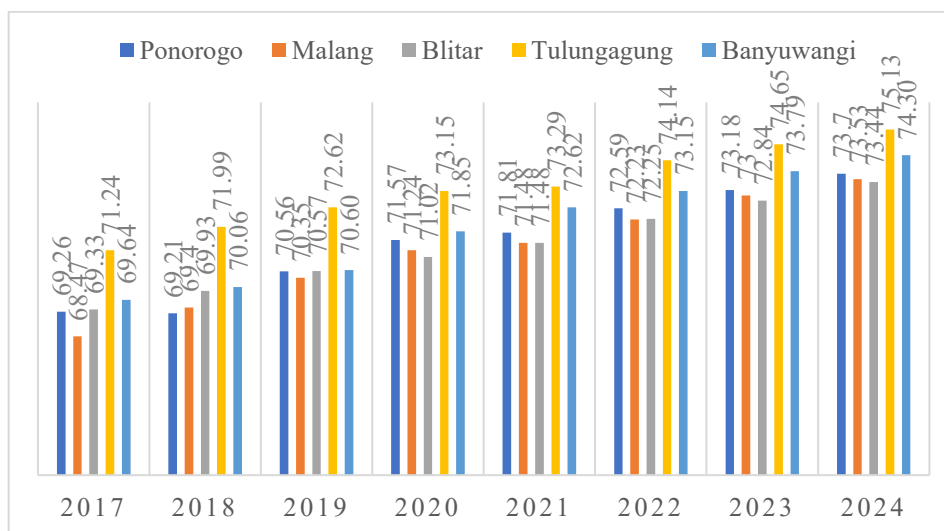
Tahun	Kabupaten (Rp)				
	Ponorogo	Malang	Blitar	Tulungagung	Banyuwangi
2017	1.388.850,00	2.368.510,00	1.520.920,00	1.537.150,00	1.730.920,00
2018	1.509.816,12	2.574.807,22	1.653.383,98	1.671.035,77	1.881.680,41
2019	1.763.267,65	2.781.564,24	1.801.406,09	1.805.219,94	2.132.779,35
2020	1.913.321,73	3.018.530,66	1.954.705,75	1.958.844,16	2.319.796,75
2021	1.938.321,73	3.068.275,36	2.004.705,75	2.010.000,00	2.314.278,87
2022	1.954.281,32	3.068.275,36	2.015.071,18	2.029.358,67	2.328.899,12
2023	2.149.709,45	3.268.275,36	2.215.071,18	2.229.358,67	2.528.899,00
2024	2.235.311,00	3.368.275,00	2.256.050,00	2.320.000,00	2.638.628,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2025f

Berdasarkan Tabel 3 nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada lima kabupaten dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak di Jawa

Timur menunjukkan tren kenaikan yang stabil selama periode 2017–2024. Kabupaten Malang secara konsisten menempati urutan tertinggi, dengan UMK yang meningkat dari Rp. 2.368.510 pada tahun 2017 menjadi Rp. 3.368.275 pada tahun 2024. Kenaikan serupa juga terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Ponorogo. Walaupun UMK terus bertambah setiap tahunnya, perbedaan upah antar kabupaten serta tingginya selisih pendapatan di negara tujuan membuat sebagian pekerja lebih memilih mencari peluang kerja di luar negeri. Situasi tersebut mendorong terjadinya migrasi internasional karena tenaga kerja menilai bahwa pendapatan yang dapat diperoleh di luar negeri jauh lebih menguntungkan meskipun UMK domestik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berperan penting sebagai faktor pendorong migrasi internasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk menilai keberhasilan serta kualitas pembangunan manusia pada suatu daerah (UNDP, 1998 dalam BPS, 2025b). Diperlukan suatu ukuran yang mampu membedakan tingkat pembangunan manusia antar daerah agar capaian pembangunan tersebut dapat diklasifikasikan dengan jelas. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk menggambarkan daerah berdasarkan tingkat pencapaian pembangunan manusia. Hasil IPM sebuah daerah kemudian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu Sangat Tinggi nilai (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 80) , Tinggi (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 70 dan kurang dari 80), Sedang (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 60 dan kurang dari 70) dan Rendah (Angka IPM kurang dari 60) (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025a). Berikut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada lima kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Jawa Timur 2017 hingga 2024:



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (diolah), 2025a

Gambar 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2017 - 2024

Berdasarkan grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada lima kabupaten di Jawa Timur, terlihat bahwa ke-lima wilayah tersebut menunjukkan pola peningkatan IPM secara konsisten selama periode 2017 hingga 2024, yang menandakan adanya kemajuan dalam kualitas pembangunan manusia. Kabupaten Tulungagung tetap berada pada posisi teratas dengan nilai IPM yang meningkat dari 72,24 pada tahun 2017 menjadi 75,13 pada tahun 2024, sehingga termasuk dalam kategori tinggi ($IPM \geq 70$ dan < 80). Kabupaten Banyuwangi juga berada dalam kategori tinggi dengan nilai IPM yang meningkat dari 69,64 pada tahun 2017 menjadi 74,30 pada tahun 2024.

Kabupaten Blitar turut berada dalam kategori tinggi dengan kenaikan nilai IPM dari 69,33 pada tahun 2017 menjadi 73,44 pada tahun 2024. Kabupaten Malang mengalami peningkatan dari 68,47 pada tahun 2017 menjadi 73,53 pada tahun 2024, sehingga bergeser dari kategori sedang menuju kategori tinggi. Sementara itu, Kabupaten Ponorogo menunjukkan perkembangan yang serupa dengan peningkatan nilai IPM dari 69,26 pada tahun 2017 menjadi 73,70 pada tahun 2024. Peningkatan IPM tersebut mengindikasikan adanya peningkatan pada aspek pendidikan, kesehatan, serta taraf hidup masyarakat yang turut mempengaruhi dinamika migrasi tenaga kerja internasional. Sejalan dengan teori human capital, individu dengan kemampuan dan kualitas yang tinggi cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk bermigrasi ke wilayah lain, karena mereka

akan menyesuaikan kemampuan yang dimiliki dengan hasil yang dicapai, baik berupa pendapatan yang lebih besar, pekerjaan yang lebih layak, maupun kondisi lingkungan, sosial, atau politik yang dianggap lebih sesuai dengan harapan (Fivien Muslihatinningsih, Juan Palem Sinaga, 2020).

Pekerja Migran Indonesia sering disebut sebagai “Pahlawan Devisa” karena peran penting mereka sebagai penyumbang devisa terbesar kedua bagi negara Indonesia. Namun, julukan tersebut belum mencerminkan segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi para PMI saat bekerja di luar negeri. Beberapa aplikasi pengaduan yang dikembangkan pemerintah seperti, E-Pengaduan, Crisis Center, dan SP4N-LAPOR belum bisa menyelesaikan masalah secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti data pengaduan yang tidak tersinergi, proses verifikasi dan tindak lanjut lambat, serta banyaknya pengaduan yang tidak tercatat atau bahkan tidak ditandatangani oleh instansi terkait (Hilmy et al., 2024 dalam Nugraheni, 2025)

Meskipun berbagai studi telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja internasional, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada lingkup yang luas seperti tingkat nasional maupun provinsi, sehingga belum mampu memberikan pemahaman spesifik mengenai daerah-daerah yang secara konsisten menjadi kontributor terbesar PMI seperti provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi dengan Jumlah PMI tertinggi di Indonesia dengan lima kabupaten yang menjadi daerah pengirim PMI tertinggi, yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Banyuwangi dengan perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, serta dinamika ketenagakerjaan yang cukup mencolok. Dengan demikian, penelitian ini dipandang perlu untuk mengisi celah penelitian yang ada melalui analisis yang lebih terarah mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum kabupaten (UMK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di lima kabupaten tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi kontribusi empiris, tetapi juga referensi bagi studi selanjutnya yang meneliti migrasi tenaga kerja pada level daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, sbb:

1. Bagaimana Pengaruh PDRB per kapita terhadap jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 5 kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 5 kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 5 kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 5 kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Provinsi Jawa Timur?
5. Bagaimana Pengaruh PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan terhadap jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 5 kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 5 kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 5 kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 5 kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 5 kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Provinsi Jawa Timur
5. Untuk mengetahui Pengaruh PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan terhadap jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 5 kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

b. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi mahasiswa

Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman terhadap faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi jumlah pekerja migran Indonesia. Penelitian ini juga melatih kemampuan berpikir kritis, penyusunan argumen ilmiah, serta penerapan metode penelitian secara sistematis sehingga menjadi bekal penting untuk pengembangan kompetensi akademik maupun profesional di masa depan.

2. Manfaat bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmiah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan menjadi referensi tambahan dalam pengembangan materi pembelajaran maupun penelitian di bidang terkait. Penelitian ini juga dapat memperkuat peran universitas sebagai institusi yang aktif menghasilkan karya ilmiah serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di masyarakat.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi dasar dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik sejenis atau memperluas variabel yang telah digunakan. Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan pembandingan, pengembangan model analisis, maupun inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif.

